

**PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP  
PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH  
DI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

Oleh:

**Toni Heryana**

*(Dosen Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)*

**Sari Kartika Dewi**

*(Alumni Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)*

**Abstract**

*This research has purposes to know how the implementation of e-government, implementation of the Government Governance and e-government influence on the implementation of the Government Governance in the Government of Cianjur. The population in this research is 58 (Fifty eight) OPD in the Government environment Cianjur. Based on purposive sampling is then used 26 (twenty six) OPD in the Government environment of Cianjur. Data collection was done through the dissemination of a questionnaire using the semantic defferential scale. To test the effect of e-government (X) with respect to the implementation of the governance of the Government (Y), then in this study used a simple linear regression. The final results of the research done indicates that the implementation of e-government on most of the Department, Agencies and Offices in Cianjur influence of 78,5% with respect to the implementation of the governance of the Department, Agencies and Offices in Cianjur. While the rest 21,5% is the influence of another factors outside of e-government.*

*Keywords: e-government, good governance, good government governance*

**Pendahuluan**

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerah setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimilikinya tersebut, maka muncul beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti sistem kerja yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah berlandaskan pada birokrasi yang kaku. Sehingga terjadi interaksi yang kompleks antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha dengan pemerintah karena proses yang panjang, lambat dan rumit. Permasalahan lain yaitu adanya tuntutan transparansi dari pihak Pemerintah terkait dengan pengelolaan tatanan Pemerintahan hal ini disebabkan dengan adanya peristiwa-peristiwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang pada akhir-akhir ini di *blow up* oleh pemberitaan dalam berbagai macam media informasi yang ada.

Oleh sebab itu adanya tuntutan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasinya partisipasi masyarakat terhadap proses

kebijakan Pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting dan butuh perhatian pemerintah. Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah sistem informasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang diterapkan di instansi Pemerintah maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi pendorong pelaksanaan penerapan *electronic government (e-gov)* sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi di pemerintahan.

Sistem *e-government* secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan (Kumar dan Best, 2006). Manfaat sistem *e-government* sendiri menurut instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam instruksi Presiden, penerapan sistem *e-government* diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintahan. Maka selain Pemerintah Pusat, semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem *e-government* tersebut. Begitu pula dengan Kabupaten Cianjur, turut menerapkan sistem *e-government*. Adapun penerapan *e-government* sendiri di Kabupaten Cianjur merupakan sebuah indikator yang dicapai dalam urusan komunikasi dan informatika yaitu adanya kepemilikan *website* Kabupaten Cianjur.

Dengan adanya sistem *e-government*, menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif dan efisien, terjalannya partisipasi masyarakat serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada publik yang berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti menetapkan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : (1) Bagaimana Penerapan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Cianjur; (2) Bagaimana Gambaran Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur; (3) Bagaimana Pengaruh Penerapan *e-Government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

### **Kajian Pustaka**

Kondisi pemerintahan saat ini mengakibatkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahannya dengan baik mulai dari proses kerja aparat pemerintah sampai dengan peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Konsepsi kepemimpinan yang baik (*good governance*) secara konseptual kata baik dalam istilah kepemimpinan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam

pencapaian tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2004:42).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat. Oleh sebab itu, sistem merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam menunjang *good government governance*, maka yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu *e-government*.

Adapun untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi guna mengaplikasikan teknologi informasi tersebut. hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Azhar Susanto (2008:207), bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari: (1) perangkat keras (*hardware*); (2) Perangkat lunak (*Software*); (3) Pengguna sistem informasi/ Sumber Daya Manusia (*Brainware*); (4) Prosedur; (5) *Database*; (6) Teknologi jaringan komunikasi. Komponen tersebut kemudian dijadikan sebuah tolak ukur untuk mengetahui pencapaian penerapan *e-government* pada lingkungan pemerintahan.

Maka dengan adanya penerapan *e-government* ini pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, dengan menerapkan sistem *e-government* ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pada tata kelola pemerintah, dengan demikian adanya penerapan *e-government* pada sebuah pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah *Good Government Governance*.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu bahwa penerapan *e-government* berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Mardalis (2009:26) pengertian metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa - apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi - kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang dijadikan sumber data berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner ke Dinas, Badan dan Kantor.

Populasi dalam penelitian ini yaitu 58 (lima puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

yaitu terdiri dari 32 Kecamatan, 17 Dinas, 7 Badan dan 2 Kantor. Teknik sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Berdasarkan teknik tersebut maka diambil sebanyak 26 sampel yaitu terdiri dari 17 Dinas, 7 Badan dan 2 Kantor

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan *e-government* yang digambarkan oleh 6 dimensi yaitu *hardware, software, brainware*, prosedur, database, dan teknologi jaringan telekomunikasi. Sedangkan untuk variabel pelaksanaan tata kelola pemerintah digambarkan oleh dimensi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dan partisipasi.

### Hasil dan Pembahasan

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan hasil yang pengolahan data kuesioner yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan *e-government* sebesar 3,92 menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-government* berada pada kategori baik. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di peroleh nilai sebesar 78,5%, artinya bahwa penerapan *e-government* memberikan pengaruh sebesar 78,5% terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur.

Untuk hasil perhitungan *mean* skor tanggapan responden mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kabupaten Cianjur sebesar 4,25. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pada sebagian besar Dinas dan Badan di Kabupaten Cianjur sudah sangat baik.

### Uji Asumsi Regresi

#### 1. Hasil Uji Asumsi Normalitas

pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pengujian Asumsi Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		26
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21797309
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.686
Asymp. Sig. (2-tailed)		.734

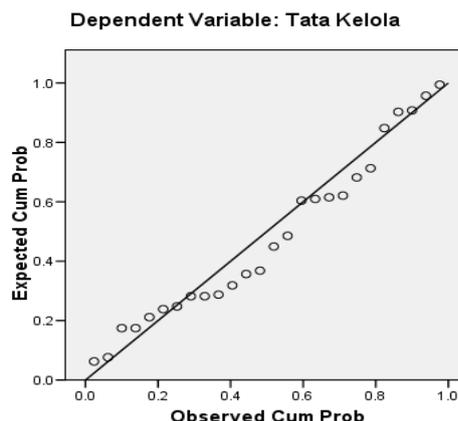
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.734, karena nilai probabilitas pada uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut pula, dapat digambarkan melalui yaitu *Probability Plot* sebagai berikut.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 1.1**  
*Probability Plot*

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa setiap titik menyebar dan tidak teratur. Artinya model regresi dikatakan baik dan datanya berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

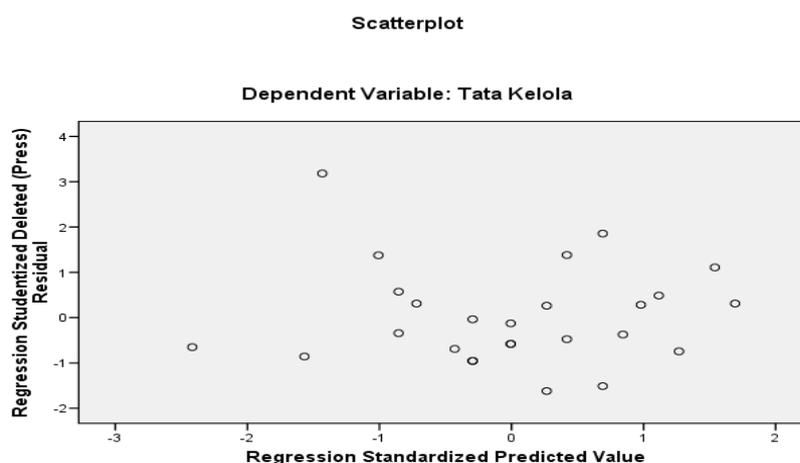
Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 1.2 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai absolut residual (*error*).

**Tabel 1.2**  
**Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas**

**Correlations**

			absolut_error	e-Government
Spearman's rho	absolut_error	Correlation Coefficient	1.000	-.076
		Sig. (2-tailed)	.	.712
		N	26	26
	e-Government	Correlation Coefficient	-.076	1.000
		Sig. (2-tailed)	.712	.
		N	26	26

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.21 diatas dapat dilihat nilai signifikansi dari koefisien korelasi variabel *e-government* dengan nilai absolut error (0,712) masih lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi gejala heteroskedastisitas). Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut pula, dapat digambarkan melalui scatterplot yaitu sebagai berikut.



**Gambar 1.2**  
*Scatter Plot*

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, menunjukkan bahwa setiap titik menyebar dan tidak teratur. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan menandakan bahwa model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik.

**Estimasi Persamaan Regresi**

Untuk mendapatkan persamaan regresi antara pengaruh penerapan *e-government* (X) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah (Y) digunakan analisis regresi linier sederhana. Berikutnya hasil penghitungannya.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Estimasi Persamaan Regresi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.358	.300		4.533	.000
	e-Government	.707	.076	.886	9.351	.000

a. Dependent Variable: Tata Kelola

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,358 + 0,707 X$$

Nilai koefisien variabel X sebesar 0,707 menunjukkan besarnya peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik apabila penerapan *e-government* meningkat satu tingkat. Kemudian nilai konstanta sebesar 1,358 menunjukkan nilai rata-rata pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik pada saat *e-government* tidak diterapkan.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 18 for windows* dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1,4**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.785	.776	.22247

a. Predictors: (Constant), e-Government

b. Dependent Variable: Tata Kelola

Nilai 0,886 ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat antara penerapan *e-Government* dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur.

Selain koefisien korelasi, pada tabel diatas juga disajikan nilai *R-square* yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD):

$$KD = (0,886)^2 \times 100\% = 78,5\%$$

Koefisien determinasi sebesar 78,5% dapat dimaknai bahwa 78,5% perubahan pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur bisa dijelaskan atau disebabkan oleh penerapan *e-government*.

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan *e-government* terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *e-government* pada sebagian besar Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Cianjur sudah baik. Demikian juga bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor tanggapan responden pada umumnya masuk dalam kategori baik, kecuali mengenai penggantian perangkat keras, ketelitian pola kerja pegawai dan penggunaan teknologi internet sebagai pendukung penerapan *e-government* yang termasuk dalam kategori sangat baik.
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada sebagian besar Dinas, Badan dan Kantor di Kabupaten Cianjur sudah sangat baik. Demikian juga bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor tanggapan responden pada sebagian butir pernyataan termasuk dalam kategori sangat

baik. Sementara rata-rata skor tanggapan responden pada sebagian butir pernyataan lainnya termasuk dalam kategori baik.

3. Penerapan *e-government* memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur, semakin baik penerapan *e-government* maka pelaksanaan tata kelola pemerintah juga akan semakin membaik. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa penerapan *e-government* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan *e-government* memberikan pengaruh sebesar 78,5% terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur.

### Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang didapat oleh peneliti terkait dengan penerapan *e-government* di Kabupaten Cianjur. Atas temuan tersebut saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, pada dimensi Pengguna (Sumber Daya Manusia) untuk indikator pelatihan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk menambah wawasan pegawai, terdapat responden yang mengisi pada nilai 3 yaitu sebanyak 50 % dan pada nilai 2 yaitu sebanyak 7,69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk pelatihan-pelatihan pegawai masih kurang. Hal ini dapat memberikan peluang masalah karena dalam penggunaan *software* (perangkat lunak) yang tersedia pada Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan mahir dalam pengoperasiannya. Oleh sebab itu sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan dalam proses pencapaian pelaksanaan penerapan sistem *e-government*. Bagi Pemerintah/Instansi sendiri maka disarankan untuk melakukan pelatihan secara berkala kepada para pegawainya dan bahkan menambah jumlah pegawai yang sesuai dengan bidangnya dalam teknologi informasi sehingga penerapan *e-government* dapat terlaksana secara optimal. Jika seluruh penerapan *e-government* dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap OPD yang ada, maka tata kelola pemerintah yang baik akan terwujud.
2. Pada dimensi *hardware* (perangkat keras) untuk indikator spesifikasi perangkat keras terdapat responden yang mengisi pada nilai 3 sebanyak 23,08% dan untuk dimensi *software* (perangkat lunak) untuk indikator kesesuaian *software* yang digunakan terdapat responden yang mengisi pada nilai 3 sebanyak 38,46 % dan pada nilai 2 sebanyak 7,69 %. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pengadaan *hardware* maupun *software* pada Dinas, Badan dan Kantor di Pemerintah Kabupaten Cianjur ini. Hal ini terkait dengan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada OPD yang terbatas. Sedangkan untuk penerapan sistem *e-government* sendiri *hardware* dan *software* merupakan perangkat utama yang mendukung penerapan *e-government*. Oleh sebab itu, sebaiknya Pemerintah memberikan alokasi anggaran dana kepada setiap OPD

di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk kepentingan peningkatan sarana dan prasarana penunjang penerapan *e-government*.

### Daftar Pustaka

- Agustine Eva.2005.*Konsep E-Government: Tantangan Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat*.SNATI:Yogyakarta
- Alim Sumarno.2012.*Penelitian Kausalitas Komparatif*. Diakses dari <http://elearning.unesa.ac.id/alim-sumarno/penelitian-kausal-komparatif>. 01 Juni 2012
- Arihdya.2012.*Validitas dan Reliabilitas*.Diakses pada <http://arihdya.caesar.wordpress.com/2012/01/13/validitas-dan-reliabilitas/>. 03 Desember 2012
- Ariyoso.2012.*Uji Validitas*.Diakses pada <http://ariyoso.wordpress.com/2009/10/31/uji-validitas/html>.
- Azhar Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi, Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.*Laporan Investasi*.Kabupaten Cianjur.
- Badan Pendidikan & Latihan. 2010. *Dasar-Dasar Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Diakses dari [http://badanpendidikan&latihan.blogspot.com/dasar-dasar good-governance.html](http://badanpendidikan&latihan.blogspot.com/dasar-dasar-good-governance.html). 05 September 2012.
- Bagus Husein Prawira 2012. Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.UPI : Bandung.
- Bastian.2003.*Perkembangan E-Government di Indonesia*. Harian Umum Sore Sinar Harapan.diakses pada tanggal 29 Mei 2012.
- Belva Hendry.2012.*Regresi Linier*. Diakses pada <http://belva.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/28/regresi-linier/html>. 03 Desember 2012
- Budi Mulyawan.2009.*Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi*. Universitas Sumatera Utara.Indonesia
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2004.*Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2009.*Metode Penelitian*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- CIMSA (2012). *Manfaat e-government*. Diakses dari <http://www.cimsaig.com>. 26 mei 2012
- Direktorat Pendidikan Tinggi Dekdikbud.2011.*arti variabel*.Diakses pada [www.dekdikbud.com](http://www.dekdikbud.com). 05 Juni 2012
- Duwi.2011.*Uji Asumsi Klasik*.Diakses pada <http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/uji-normalitas-regresi.html>.03 Desember 2012
- Eddy Satriya.2009.*Electronic Government*.diakses dari [http://edy-electronic-government\\_20091015100739\\_203020.doc](http://edy-electronic-government_20091015100739_203020.doc)
- E-Government System dalam Pelayanan Publik*.2012.Diakses pada <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2012/07/30/e-government-system-dalam-pelayanan-publik-481875.html>. 27 Desember 2012

- Enam strategi menuju e-government. diakses pada <http://www.dudung.net/teknologi-informasi/6-strategi-menuju-e-government.html>. 01 Juni 2012.
- Erick S Holle. 2011. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. Jurnal Sasi Vol.17 No.3.
- Fathul Wahid. 2012. *Apa Kabar E-Government Indonesia?*. Diakses dari <http://fathulwahid.wordpress.com/2012/04/13/apa-kabar-e-government-indonesia/>. 01 Juni 2012
- Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia Berprestasi. *E-Government Indonesia ke 23 di dunia dalam laporannya yang bertajuk Waseda University International e-Government Ranking oleh Waseda University Institute of e-Government, Tokyo, Jepang*. Diakses pada 01 Juni 2012. Dari <http://E-Government Indonesia ke-23 DuniaIndonesia Berprestasi.html>
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Irham Habib. 2007. *Pengaruh e-Government terhadap upaya Pelaksanaan Good Governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I*: Jakarta.
- Johnson and Christensen. 2008. *Educational Research; quantitative, qualitative, and Mixed Approaches*. Sage Publications.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance telaah dari dimensi: akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah penulis*. Surabaya: Insan Cendekia
- Jordan. 2000. *E-Government Plan*. Diakses pada <http://www.penerapan-e-government-sebagai-media-transparansi-dan-akuntabilitas-pemerintah.html>. 27 Desember 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. *definisi pemerintah*. Diakses pada <http://kbbi.web.id>. 05 September 2012
- Karin dan Fathul. 2009. *Dampak E-Government Pada Good Governance: Temuan Empiris dari Kota Jambi*. SNATI. Yogyakarta.
- Komisi Ombudsman Nasional. 2010. *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia*.
- Kumar, R., dan Best, M. L. (2006). *Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India. The Information Society*.
- LAN-BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LANRI
- Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Cianjur. 2008. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Cianjur*.
- M. Iqbal Hasan. 2009. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Manalu, Radot.2010.*Pendayagunaan E-Government untuk Mendukung Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Institusi Pemerintah Daerah*. Diakses dari <http://pakkatnews.com/pendayagunaan-e-government-untuk-mendukung-pemerintahan-yang-baik-good-governance-pada-institusi-pemerintah-daerah.html> pada tanggal 05 September 2012.
- Mardalis.2006.*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).*Pengertian Good Governance*.Diakses dari <http://www.menpan.go.id>: 01 Juni 2012
- Moh.Mahfud.2011.*Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*.Diakses pada [www.mahfudmd.com/index](http://www.mahfudmd.com/index).27 Desember 2012
- Nurchayani dan Daru.2008.*Peranan e-Government dalam rangka mewujudkan Good Governance bagi Masyarakat*.SNIF.Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur*.2011.Cianjur
- Pemerintah Kabupaten Cianjur.Informasi data SKPD Kabupaten Cianjur.diakses pada [www.CianjurKab.go.id](http://www.CianjurKab.go.id). : 28 Mei 2012
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur No.07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Prastowo, Bambang N.2004.*Manajemen E-Government (elemen-elemen e-government)*.Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.Indonesia
- Richardus Eko Indrajit.2004.*Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.Yogyakarta: ANDI Offset
- Riva Fauziah.2007.Pelayanan Publik yang Berkualitas.Diakses dari <http://rivafauziah.wordpress.com>. : 01 Juni 2012
- Sedarmayanti.2004.*Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Kepemerintahan yang baik)*.Bandung: CV Mandar Maju
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto, S.K. 2008. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharyadi dan Purwanto, S.K. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wirartha, I Made.2006.*Metode Penelitian Sosial Ekonomi*.Yogyakarta : ANDI Offset

World Bank. “*A definition of e-Government*”: Diakses pada [www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm](http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm). 05 Agustus 2012